

Title : Politik Digital: Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

Author(s) : Retno Safitri, Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD.

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Politics, Industry, Education, Technology, Communication

ARTIKEL ILMIAH

POLITIK DIGITAL: INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0

DIGITAL POLITICS: INDONESIA IN THE FACE OF INDUSTRIAL ERA 4.0

Oleh: ¹Retno Safitri, ²Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD.

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Kota Serang, Prov. Banten

Email: 1111200046@untirta.ac.id

ABSTRAK

Hadirnya era revolusi industry keempat (industry 4.0) yang mana sudah tidak dapat dipungkiri lagi membawakan banyak perubahan. Sudah saatnya Indonesia mempersiapkan Langkah-langkah yang strategis agar mampu beradaptasi dengan era industry digital ini. Indonesia pun sudah berkomitmen untuk menciptakan dan membangun industry serta manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industry digital 4.0. Menteri Perindustrian menargetkan, aspirasi-aspirasi besar nasional dapat tercapat. Industry 4.0 melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas. Dengan adanya politik digital di era industry 4.0 ini dimana kehadiran teknologi digital saat ini dapat dimanfaatkan dalam penguatan system demokrasi Indonesia dalam membuka ruang demokrasi yang lebih jujur dan adil dalam proses pemilihan umum (Pemilu) sebagai contoh yang mulai dilakukannya perubahan dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai menyusun regulasi serta pengembangan aplikasi agar proses Pemilu dengan memanfaatkan era digitalisasi saat ini dapat segera diterapkan. Namun di sisi lain digitalisasi industry ini pun tak lepas dari dampak negatifnya.

Maka dari itu pemerintah harus pula mengantisipasi dan memikirkan dampak negatif dari system industry 4.0 pada saat ini pada saat pemerintah sudah memutuskan untuk beradaptasi dengan system industry 4.0 jangan sampai penerapannya hanya menjadi beban karena tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: Politik digital, Demokrasi, Komunikasi politik, Industri.

ABSTRACT

The presence of the fourth industrial revolution era (industry 4.0) which is undeniably brings many changes. It is time for Indonesia to prepare strategic steps to be able to adapt to this digital industry era. Indonesia has also committed to creating and building industries and manufacturing that are globally competitive through the acceleration of the implementation of the digital industry 4.0. The Minister of Industry targets that the great aspirations of the national can be achieved. Industry 4.0 through its connectivity and digitization is able to improve the efficiency of the manufacturing chain and quality. With the existence of digital politics in the industrial era 4.0 where the presence of digital technology today can be used in strengthening indonesia democratic system in opening a more honest and fair democratic space in the general election process (Pemilu) as an example of what changes are starting to be made by adapting to technological developments. The General Election Commission (KPU) has begun to compile regulations and develop application so that the election process by utilizing the current digitalization era can be implemented immediately. But on the other hand, the digitalization of this industry cannot be separated from its negative impact. Therefore, the government must also anticipate and think about the negative impact of the industry 4.0 system at this time when the government has decided to adapt to the industry 4.0 system, don't be the same as the implementation is only a burden because it is not used optimally.

Keywords: Digital politics, Democracy, Political communication, Industry.

PENDAHULUAN

Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi istilah lain dari industry 4.0. disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi teknologi dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena bidang kinerja tidak lagi berifat linear. Hadirnya revolusi industry 4.0 memberikan dampak yang begitu besar pada Indonesia yakni dengan hadirnya kinerja-kinerja yang lebih modern dan maju yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.

Menurut Prof. Klaus Martin Schwab, teknisi dan ekonom Jerman yang juga pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum, yang pertama kali memperkenalkannya. Dalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution* (2017), ia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara mendasar mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Pemerintah saat ini tengah melakukan Langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan *making Indonesia 4.0*. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang era revolusi industry 4.0 ini. Salah satu visi Indonesia dalam penyusunan *making Indonesia 4.0* adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Melihat masyarakat sebagai elemen yang penting dalam komunikasi politik, menjadikan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini dimana masyarakat Indonesia di tengah hilangnya kepercayaan public terhadap media internet/media tradisional yang mana lebih didominasi oleh pasar dan kekuatan politik. (Nugroho, 2012; Patria, 2013). Seperti diketahui, era Reformasi Keagamaan tahun berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka ruang yang besar bagi pendirian media massa bagi masyarakat Indonesia. Setelah reformasi pada orde baru, negara mendominasi media selama reformasi berdasarkan untuk kepentingan ekonomi dan politik. Penggunaan teknologi

komunikasi digital untuk mendorong partisipasi publik dalam demokrasi dikenal sebagai “demokrasi digital”, dan media sosial telah membuka area baru untuk studi demokrasi. Munculnya istilah “demokrasi digital” yang menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi terjadi di dunia internet, menggambarkan bagaimana internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berperan dalam merevolusi sistem, struktur, dan proses demokrasi yang telah dilakukan sejauh ini. Penggunaan media sosial dalam politik pasti akan mendorong diskusi publik tentang keadaan yang ada. Media sosial digunakan sebagai ukuran keterlibatan politik dalam konteks demokrasi digital karena kita dapat melihat bahwa pemilih dapat menggunakannya untuk menyuarakan pemikiran mereka tentang masalah politik (Wahyudi,2018).

PEMBAHASAN

POLITIK DIGITAL: INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap demokrasi politik, infrastruktur, dan pengembangan pembangunan. Pembangunan-pembangunan, kemajuan teknologi serta polarisasi politik di Indonesia melalui media sosial sangat dirasakan semenjak bergulirnya pesta demokrasi pada tahun 2014 pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia. Penggunaan media sosial untuk saat ini menjadi lahan politik yang sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan, mulai dari pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi, program-program kerja yang telah dibuat untuk direalisasikan, politisi dan partai politik dalam menambah elektabilitas dan popularitas, bahkan masyarakat sipil pada umumnya menggunakan media sosial untuk mengakses informasi-informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Bahkan penggunaan teknologi yang sudah maju di era industry 4.0 ini sangat terbuka dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja. Demokrasi digital yang didefinisikan sebagai pemanfaatan

teknologi komunikasi digital guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

Era revolusi industri 4.0 mengakibatkan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi secara cepat dan pesat. Media sosial menjadi ruang publik dalam berpolitik khusus untuk dunia politik digital masyarakat dapat lebih cepat dan merespon informasi yang mereka butuhkan, sehingga media sosial tidak jarang memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terlebih lagi mengenai politik. Perubahan bentuk komunikasi politik adalah pola dan peran masyarakat sebagai aktor politik itu sendiri. Komunikasi politik melalui media sosial menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi, agar menguntungkan bagi elit politik yang memiliki kepentingan. Dalam tahun terakhir ini, perbincangan mengenai politik memang tidak lagi menjadi perbincangan yang hanya dimiliki oleh elit politik, intelektual, pemerintah dan mahasiswa. Era revolusi industri 4.0 memberikan ruang buat semua orang-orang untuk berbicara masalah politik, mulai dari masyarakat yang ada di lapisan paling bawah sampai lapisan masyarakat paling atas, sehingga semua orang dapat berbicara apa saja. Sehingga dengan perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 menambah ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pemikirannya dan berinteraksi langsung dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Pemanfaatan perkembangan teknologi ini juga menjadi ruang baru bagi para politisi, partai politik dan pemerintah untuk digunakan berdiskusi dengan masyarakat, terutama masyarakat pemilihnya, sehingga memberikan kemudahan bagi semua elemen untuk berinteraksi mendiskusikan tentang segala hal yang menyangkut kepentingan individu, kelompok atau golongan bahkan urusan ekonomi, sosial dan politik. Perkembangan media sosial mampu memberi ruang yang sebebaskan-bebasnya bagi masyarakat sehingga semua bisa memberikan opini sesuai keinginannya.

Disamping dengan segala keunggulan reformasi industri era 4.0 yang banyak menciptakan infrastruktur yang lebih maju, pembangunan-pembangunan, alat yang semakin canggih namun disisi lain ada pula dampak negatif yang

ditimbulkan dari adanya reformasi industry 4.0 ini yakni terancamnya tenaga kerja manusia yang tergantikan oleh kecerdasan buatan mesin ataupun robot. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat yang mungkin saja akan menyebabkan kesenjangan sosial. Hal ini tentu saja akan menambahkan beban masalah local maupun nasional oleh karena itu untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industry 4.0 ini wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi dan manusia.

KESIMPULAN

Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang besar terhadap polarisasi politik, dimana penggunaan media sosial menjadi pilah banyak patrai politik, politisi, dan pemerinyah dalam melakukan kegiatan politiknya. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya akses media sosial bagi semua kalangan masyarakat. Namun, dalam penggunaan media sosial masyarakat pemilih diharapkan mampu untuk lebih selektif, sehingga informasi yang diterima bisa sampai dan difahami dengan baik. Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi Industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor. Indonesia telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0.